

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Sistem akuntansi penggajian merupakan salah satu sistem akuntansi yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep. Sistem akuntansi penggajian bertujuan untuk memberikan informasi mengenai penggajian yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep dan menyajikannya dengan tepat baik dalam jumlah maupun waktu pembayaran. Dengan adanya sistem akuntansi yang baik maka kegiatan yang ada dalam organisasi akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan evaluasi dan pembahasan yang telah dijelaskan pada bab 4 sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem akuntansi penggajian karyawan yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep sudah cukup baik. Hal tersebut dapat diketahui sebagai berikut :

1. Pada UPT. Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep terdapat prosedur-prosedur dalam sistem penggajian yang dimulai dari prosedur pencatatan waktu hadir, prosedur pembuat daftar gaji sampai dengan prosedur pembayaran gaji. Dalam prosedur penggajian yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep cukup baik tetapi masih ada prosedur yang dijalankan oleh pihak yang tidak bertugas.

2. Dokumen-dokumen yang digunakan untuk sistem akuntansi penggajian karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep yaitu dokumen persyaratan penggajian, dokumen yang digunakan dalam perubahan jumlah gaji karyawan, daftar permintaan penyediaan untuk pembayaran gaji dan tunjangan karyawan, surat pernyataan adanya mutasi, buku absensi dan SPJ. Dokumen-dokumen yang digunakan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep telah dilakukan adanya pembagian fungsi dalam sistem akuntansi penggajian karyawan, seperti fungsi pencatatan waktu hadir, fungsi pembuat daftar gaji, fungsi akuntansi dan fungsi keuangan. Kelemahan dalam pemisahan fungsi yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep yaitu fungsi yang dijalankan tidak sesuai dengan *job description*. Hal tersebut dapat mengakibatkan adanya risiko kesalahan dalam penggajian yang semakin besar.
4. Komponen-komponen gaji karyawan yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep terdiri dari komponen penambah dan komponen pengurang. Komponen-komponen gaji karyawan telah sesuai dengan peraturan pemerintahan yang berlaku.
5. Perhitungan gaji karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep sudah menggunakan sistem terkomputerisasi yang dapat mempermudah dalam perhitungan gaji karyawan dan menimalisir adanya

kesalahan perhitungan. Catatan akuntansi dalam penggajian karyawan yaitu buku rekap gaji karyawan dan SPJ gaji. Kelemahan dalam catatan akuntansi di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep yaitu rekap gaji karyawan masih menggunakan cara manual yaitu menulis di buku.

6. Pengendalian internal yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep sudah baik. Dimana dalam pengendalian internal terdiri dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penafsiran risiko-risiko, informasi komunikasi, dan pengawasan. Dalam lingkungan pengendalian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep sudah baik. Kelemahan pengendalian internal yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu tidak adanya pembaruan data karyawan secara berkala, tidak adanya pengecekan kembali terhadap kebenaran dan ketelitian daftar gaji karyawan sebelum dikirim ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Evaluasi sistem akuntansi penggajian di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep lumayan baik, hanya masih ada kelemahan-kelemahan yang dapat mengakibatkan kesalahan penggajian seperti prosedur penggajian, fungsi-fungsi yang terkait dengan sistem akuntansi penggajian karyawan serta pengendalian internal yang tidak ada pembaruan data dan tidak adanya pengecekan kembali terhadap dokumen terkait.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kelemahan yang ditemukan dalam sistem akuntansi penggajian yang ada di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisir adanya kesalahan dalam pembuatan daftar gaji, sebaiknya dilakukan adanya prosedur penggajian dan fungsi-fungsi yang sesuai dengan *job description* yang sudah ada.
2. Agar tidak ada kesalahan nominal yang berkaitan dengan besarnya tunjangan-tunjangan karyawan, sebaiknya diberlakukan adanya pembaruan data karyawan secara berkala.
3. Sebaiknya semua pejabat yang berperan dalam sistem akuntansi penggajian karyawan melakukan pengecekan kembali sebelum menandatangani surat permintaan pembayaran gaji dan tunjangan untuk mencegah adanya kesalahan sebelum diserahkan kepada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Untuk mengetahui adanya kesalahan dan kecurangan dengan cepat yang terjadi pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep maka diperlukan adanya evaluasi atau audit terhadap semua hasil kerja karyawan sehingga tidak hanya menunggu adanya pengawasan dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep.

### **5.3. Implikasi Penelitian**

Berdasarkan hasil evaluasi dan penelitian yang dilakukan pada sistem akuntansi penggajian karyawan di UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep berjalan dengan baik. Namun, ada beberapa kelemahan pada sistem akuntansi penggajian karyawan yang mengakibatkan adanya kesalahan. Sehubungan dengan adanya hal tersebut hasil penelitian memberikan implikasi. Adapun implikasi penelitian sebagai berikut:

#### 1. Implikasi praktis

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan bagi UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep untuk lebih memperhatikan prosedur penggajian dan fungsi sistem akuntansi penggajian agar dijalankan sesuai dengan tugas pekerjaan masing-masing. Karena dengan menjalankan prosedur dan fungsi yang sesuai dengan *job description* akan meminimalisir adanya kesalahan dalam penggajian karyawan. Selain itu diperlukan juga untuk memperbaiki pengendalian internal yang ada pada UPT Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Sumenep seperti pengecekan kembali terhadap kebenaran dokumen-dokumen yang dikerjakan oleh pegawai dan pembaruan data karyawan yang mempengaruhi perubahan gaji.

#### 2. Implikasi teoritis

Implikasi teoritis dari penelitian adalah sekiranya dapat menjadi acuan bagi para akademisi mengenai sistem akuntansi penggajian karyawan. Untuk mengetahui sistem akuntansi penggajian karyawan yang baik maka

diperlukan adanya evaluasi terhadap prosedur penggajian, dokumen yang digunakan, fungsi-fungsi, komponen penggajian dan perhitungan gaji, catatan akuntansi yang digunakan serta pengendalian internal terhadap sistem akuntansi penggajian karyawan.



## DAFTAR RUJUKAN

- Adityo Suryo.2010.”*EVALUASI SISTEM PENGGAJIAN DAN PENGUPAHAN PADA UD.BERDIJAYA*”(online),  
(<http://eprints.uns.ac.id/9220/1/157102408201008431.pdf>, diakses 26 desember 2016).
- Anastasia Diana, Lilis Setiawati. 2011. *Sisten Informasi Akuntansi*. Yogyakarta:ANDI.  
<http://www.beritapns.com/2016/07/gaji-dan-tunjangan-pns-dalam-uu-asn.html>, diakses 28 Maret 2017.
- JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim. 2012. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur*. Surabaya JDIH Biro Hukum Setda Jatim.
- JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim. 2016. *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur*. Surabaya JDIH Biro Hukum Setda Jatim.  
[kbbi.co.id](http://kbbi.co.id).(online),diakses20 Maret 2017
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2015. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2015 Tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta Kementerian Sekretariat Negara.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2016. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah*. Jakarta Kementerian Sekretariat Negara.
- Kezia Rafika Lumanaw dan Jantje Tinangon. 2016. ”*EVALUASI PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI PENGGAJIAN UNTUK PENGENDALIAN INTERN PADA PT. BPR DANAKU MAPAN LESTARI DI KOTA BITUNG*”(online),  
(<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/viewFile/12799/12389>, diakses 29 maret 2017).
- Krisfandi Setyo Nugroho. 2013. “*PENGARUH PEMBERIAN TUNJANGAN TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN*”(online),

([http://repository.upi.edu/151/4/S\\_PEM\\_0807125\\_CHAPTER1.pdf](http://repository.upi.edu/151/4/S_PEM_0807125_CHAPTER1.pdf) , diakses 29 maret 2017).

Marshall B.Romney, Paul John Steinbart. 2016. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi13. Jakarta Selatan:Salemba Empat.

Michael Quinn Patton, 2009, *Metode Evaluasi Kualitatif*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Mulyadi,2016.*Sistem Akuntansi*.Edisi 4. Jakarta Selatan:Salemba Empat.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2003. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*. Jakarta Sekretariat Negara.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta Sekretariat Negara.

Sekretaris Negara Republik Indonesia. 1981. *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah*. Jakarta Sekretaris Negara.

TMBooks.2015.*Sistem Informasi Akuntansi-Konsep dan Penerapan*. Yogyakarta:ANDI.

V.Wsiratna Sujarweni. 2015. *Sistem Akuntansi*. Yogyakarta:Pustaka Baru Press. [www.bkn.go.id/](http://www.bkn.go.id/), diakses 05 April 2017.

Zaki Zubaidi, “Pemprov Bentuk UPT Badan Pendapatan Daerah.” Koran Sindo. 27 September 2016, (online). (<http://koran-sindo.com/news.php?r=5&n=16&date=2016-09-27?r=5&n=16&date=2016-09-27> diakses 22 April 2017).